


**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN PERTANIAN PARTISIPATIF
SPESIFIK LOKAL**

**Penerapan Pendekatan Penyuluhan Pertanian Partisipatif
(Memfokuskan Kembali Penyuluhan Pertanian kepada Petani-Nelayan)**



**PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

2001

083.8)

D



PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN PARTISIPATIF SPESIFIK LOKAL

**Penerapan Pendekatan Penyuluhan Pertanian Partisipatif
(Memfokuskan Kembali Penyuluhan Pertanian kepada Petani-Nelayan)**

**PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2001**



PERATURAN PERUNTUKAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MALAYSIA

[The main body of the document contains extremely faint and illegible text, likely the regulations themselves.]

KATA PENGANTAR

Pencapaian tujuan pembangunan pertanian, yaitu meningkatnya produktivitas usahatani, pendapatan dan kesejahteraan petani-nelayan tidaklah mungkin dilakukan dengan mengabaikan peranserta aktif petani-nelayan sebagai pelaku pembangunan pertanian. Upaya untuk melibatkan petani-nelayan dalam pembangunan pertanian dilakukan mulai dari proses perencanaan usahatani atau dikenal dengan pendekatan partisipatif.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu yang lampau penyuluhan pertanian berlangsung dengan pendekatan yang lebih berat kepada *top-down approach* dan bersifat sentralistik, sehingga penyelenggaraannya belum terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip dan ciri-ciri penyuluhan partisipatif yang berfokus kepada petani-nelayan dan keluarganya. Sebagai akibatnya, upaya pemberdayaan petani-nelayan pun belum berlangsung secara optimal.

Dengan berlakunya UU, No 22/99 tentang Pemerintah Daerah dan Kebijakan Departemen Pertanian tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dalam Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis yang memposisikan petani-nelayan sebagai pelaku utamanya, maka dirasakan perlunya disusun buku penyelenggaraan penyuluhan partisipatif ini dengan tujuan agar para penyuluh pertanian dan petugas lain yang berhubungan dengan masyarakat petani-nelayan dapat menerapkan prinsip-prinsip dan ciri-ciri penyuluhan pertanian partisipatif. Di era otonomi daerah, buku ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penerapan pendekatan penyuluhan pertanian partisipatif (*bottom-up approach*).

Dengan memfokuskan kembali penyuluhan pertanian kepada petani-nelayan, maka upaya pemberdayaan petani-nelayan diharapkan dapat berlangsung secara optimal dan bermuara pada kemandirian petani-nelayan dan keluarganya.

Akhirnya kami berharap agar buku ini bermanfaat pula bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dukungan mereka kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian dan petugas lain yang selalu berhubungan dengan masyarakat petani-nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani-nelayan dan keluarganya dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk perbaikan taraf hidup mereka.

Jakarta, November 2001
Kepala Pusat
Pengembangan Penyuluhan Pertanian,



Ir. Moch. Anas Rasyid, M.Ed.
NIP. 080.016.204

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	5
II. TUJUAN DAN KELUARAN PENERAPAN PENDEKATAN PENYULUHAN PARTISIPATIF	8
A. Tujuan	9
B. Keluaran	9
III. PRINSIP-PRINSIP DAN CIRI-CIRI PENYULUHAN PERTANIAN PARTISIPATIF	11
A. Prinsip-prinsip Penyuluhan Partisipatif	11
B. Ciri-Ciri Penyuluhan Pertanian Partisipatif	14
IV. STRATEGI PENYELENGGARAAN	19
V. INDIKATOR KUALITAS PENYULUHAN PARTISIPATIF	22
A. Indikator Tujuan	22
B. Indikator Keluaran	23
VI. PENUTUP	25

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang antara lain dicirikan dengan perdagangan bebas menuntut pembangunan pertanian nasional untuk dapat menyesuaikan diri dengan pergeseran-pergeseran pola dan sistem perdagangan internasional, termasuk di dalamnya perdagangan produk-produk pertanian. Peningkatan daya saing produk-produk pertanian nasional ditempuh antara lain melalui upaya mempersiapkan dan mengembangkan komoditas-komoditas pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat di sisi lain telah mempermudah masyarakat memperoleh berbagai informasi dari belahan dunia mana pun. Sementara itu, peningkatan pendapatan masyarakat konsumen telah menyebabkan berubahnya selera dan kebutuhan mereka. Hal ini selanjutnya menuntut penyediaan produk-produk pertanian yang sesuai dengan perkembangan selera dan kebutuhan konsumen, baik dalam kualitas, kuantitas, waktu penyampaian maupun harga yang mampu bersaing.

Di dalam negeri telah terjadi reformasi dalam pembangunan nasional dengan pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang memberi keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri. Kondisi ini sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Karena pembangunan sistem dan usaha agribisnis menyangkut kepentingan petani-nelayan dan keluarganya, maka inisiatif harus berasal dari petani-nelayan atau masyarakat tani sendiri.

Untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut, maka penyuluhan pertanian perlu mereformasikan diri agar dapat mewujudkan tuntutan perubahan dan tetap

relevan dengan perkembangan yang terjadi di era globalisasi ini. Beberapa tuntutan perubahan yang perlu dipenuhi dalam merespon hal-hal tersebut antara lain adalah:

1. Reposisi penyuluh pertanian agar mampu menjadi mitra sejajar petani-nelayan dengan melakukan peran sebagai penyedia jasa pendidikan, sebagai fasilitator, motivator, sebagai mitra sejajar dan sebagai konsultan atau penasihat petani-nelayan yang profesional dan mandiri;
2. Redinamisasi kepemimpinan petani-nelayan yang berbasis pada kelompok usaha, dengan pengambilan keputusan yang mandiri oleh petani-nelayan;
3. Restrukturisasi kelembagaan penyelenggara penyuluhan pertanian dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang didukung oleh partisipasi petani-nelayan dan keluarganya pada khususnya dan masyarakat umumnya dalam rangka pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian; dan
4. Reorientasi program/programa penyuluhan pertanian yang mencerminkan perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*), bersifat terpadu, spesifik lokasi, berorientasi agribisnis, jender sensitif serta berwawasan lingkungan.

Paradigma baru penyuluhan pertanian menuntut agar penyuluhan pertanian difokuskan kembali kepada petani-nelayan dan keluarganya selaku pelaku pembangunan pertanian. Dengan demikian kedudukan petani-nelayan dan keluarganya dalam pembangunan pertanian adalah sebagai pelaku utama dan sebagai subyek, bukan sebagai obyek.

Apabila dikaitkan dengan kebijaksanaan pembangunan pertanian dewasa ini, maka paradigma tersebut dapat diterjemahkan sebagai upaya memberdayakan petani-nelayan dan keluarganya sebagai aktor dalam sistem dan usaha agribisnis secara utuh serta selaras dengan pembangunan wilayah. Hal ini menuntut kemampuan penyuluh pertanian untuk memfasilitasi para petani-nelayan dan keluarganya dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku mereka ke arah yang lebih baik serta kemampuan untuk memfasilitasi

berjalannya proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan dan usahatani petani-nelayan dari, oleh dan untuk mereka sendiri.

Upaya untuk mendudukkan, memerankan dan memfungsikan kembali penyuluhan pertanian bukanlah hal yang mudah, mengingat dalam tiga dasa warsa terakhir ini kondisi penyuluhan pertanian berada dalam posisi yang cukup memprihatinkan. Kondisi ini bukan tanpa sebab, karena selama kurun waktu tersebut, hampir semua program dan proyek pembangunan berasal dari atas, sehingga upaya pemberdayaan petani-nelayan yang ditumbuhkembangkan dari bawah dengan basis kekuatan, kapasitas, kemampuan dan keswadayaan mereka belum sepenuhnya terjamah dengan baik bahkan terlupakan sama sekali.

Secara umum penghambat penyelenggaraan penyuluhan pertanian partisipatif adalah adanya berbagai masalah antara lain adalah :

1. Kebijakan
 - 1) Visi, misi dan tujuan pengembangan program tidak diikuti oleh strategi yang jelas;
 - 2) Kebijakan pendekatan partisipatif dirasakan belum dilakukan secara menyeluruh dan meluas;
 - 3) Adanya inkonsistensi kebijakan;
 - 4) Kebijakan-kebijakan operasional pembangunan masih bersifat sentralistik dan seragam.
2. Kelembagaan
 - 1) Struktur organisasi penyelenggara penyuluhan pertanian khususnya di kabupaten sering berubah-ubah, sehingga tidak memberikan iklim yang kondusif bagi para penyuluh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - 2) Kelembagaan petani-nelayan banyak yang belum mapan karena penumbuhan dan pengembangannya banyak mendapat intervensi dari pihak-pihak luar;
 - 3) Model perencanaan yang mekanistik;

- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek lebih berorientasi pada input dan hasil tanpa memperhatikan proses;
 - 5) Sistem pembangunan yang masih bersifat sentralistik dan mekanistik kurang dapat menampung aspirasi masyarakat secara optimal;
 - 6) Struktur dan mekanisme kerja kelembagaan yang masih terpusat;
 - 7) Adanya produk hukum yang mengikat pelaksana (SK, Juklak, Juknis).
3. Metodologi
- 1) Penerapan pendekatan partisipatif terhambat oleh metodologi yang dirasakan belum mampu untuk cepat dapat digunakan dalam skala yang lebih luas di segala tingkatan;
 - 2) Pada umumnya penerapan metodologi partisipatif masih belum dilakukan secara meluas.
4. Sumberdaya Manusia
- 1) Kurangnya pemahaman dan penghayatan yang benar mengenai pengertian metodologi partisipatif oleh para penyuluh dan petugas lainnya;
 - 2) Penyuluh dan petugas kurang sabar dalam menerapkan pendekatan partisipatif yang pada umumnya memerlukan waktu yang relatif lebih banyak;
 - 3) Sikap dan perilaku serta mental penyuluh dan petugas yang terbiasa sebagai penguasa;
 - 4) Penyuluh dan petugas lainnya pada umumnya enggan melakukan identifikasi potensi, kemampuan dan masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh petani-nelayan dan keluarganya;
 - 5) Inisiatif dan aspirasi petani-nelayan belum sepenuhnya tergali dan dimanfaatkan dalam program-program pembangunan pertanian.

Penyuluhan pertanian yang merupakan bagian dari sistem pembangunan pertanian dan merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat secara persuasif edukatif seyogyanya dilakukan dengan menerapkan prinsip-

prinsip penyuluhan pertanian secara baik dan benar. Dengan demikian penggunaan metode penyuluhan pertanian partisipatif yang berfokus kepada kepentingan serta aspirasi petani-nelayan dan keluarganya mutlak diterapkan guna mewujudkan keberdayaan petani-nelayan dan keluarganya dalam memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itulah dipandang perlu untuk menggalakkan dan mensosialisasikan penerapan pendekatan penyuluhan pertanian partisipatif secara lebih luas dengan memfokuskan kembali penyuluhan pertanian kepada petani-nelayan.

B. Pengertian

Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal) bagi petani-nelayan beserta keluarganya serta anggota masyarakat pertanian lainnya, terutama di pedesaan. Ciri-ciri pendidikan luar sekolah tersebut adalah: (1) tidak ada paksaan untuk belajar; (2) materi pendidikan didasarkan atas kebutuhan petani; dan (3) dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk petani.

Dengan demikian penyuluhan pertanian adalah upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif guna membantu petani-nelayan dan keluarganya agar mereka berkembang menjadi dinamis dan berkemampuan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri, sehingga pada akhirnya mampu menolong diri mereka sendiri.

Pendekatan partisipatif adalah proses yang melibatkan berbagai pihak terkait (*stakeholders*) yang dimulai dari proses penjajagan (identifikasi) kebutuhan, permasalahan dan potensi sampai dengan pengambilan keputusan dan perumusan tujuan dalam upaya memecahkan masalah serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan.

Pada pendekatan partisipatif ini berlaku prinsip-prinsip kesetaraan dan kemitraan, keterbukaan, kesetaraan kewenangan dan tanggungjawab, serta kerjasama.

Melalui penerapan pendekatan penyuluhan pertanian partisipatif petani-nelayan beserta keluarganya didorong untuk ikut ambil bagian dalam proses pembelajaran yang

edukatif dan persuasif sampai akhirnya mereka mampu mengambil keputusan sendiri dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Dengan demikian penyuluhan pertanian partisipatif spesifik lokasi adalah pendidikan luar sekolah (non formal) bagi petani-nelayan beserta keluarganya serta anggota masyarakat pertanian lainnya melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan kemampuan untuk memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka di wilayah masing-masing dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemitraan, keterbukaan, kesetaraan kewenangan dan tanggungjawab, serta kerjasama, yang ditujukan agar mereka berkembang menjadi dinamis dan berkemampuan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri.

"Partisipasi" bukan dimaksudkan dengan "masyarakat ikut mensukseskan suatu program/proyek", namun sebaliknya para penyuluh, petugas dan tenaga ahli yang "ikut mensukseskan" gerakan petani-nelayan. Hanya dengan pola pembangunan pertanian yang "kreatif" ini akan dapat diwujudkan transformasi di kalangan petani-nelayan maupun di kalangan aparat pertanian sendiri, yang mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Walaupun menyangkut upaya yang cukup sulit dan memakan waktu untuk meninggalkan kebiasaan dan kepercayaan lama serta menerima cara-cara serta pola pikir yang baru, namun sebagai proses yang melibatkan berbagai pihak terkait (*stakeholders*), pendekatan partisipatif akan memberi beberapa dampak positif antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan petani-nelayan akan lebih sesuai dengan kondisi nyata;
2. Menimbulkan rasa memiliki dan tanggungjawab petani-nelayan beserta keluarganya pada khususnya dan masyarakat tani umumnya baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program atau kegiatan mereka sendiri;
3. Memberdayakan semua pihak (*stakeholders*);

4. Pelaksanaan program atau kegiatan lebih objektif dan fleksibel;
5. Mendorong tumbuhnya keterbukaan.

Peran yang perlu dimainkan dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian khususnya beserta instansi/ kelembagaan pembangunan pertanian umumnya dalam penyuluhan pertanian partisipatif, antara lain adalah:

1. Bertindak lebih sebagai pemandu dan pendorong (*fasilitator* dan *enabler*);
2. Lebih mempertimbangkan aspek-aspek non-teknis;
3. Menyeimbangkan distribusi kekuasaan untuk menghindari dominasi yang dapat menghambat keterlibatan petani-nelayan;
4. Memberi informasi terbuka dan menumbuhkan komunikasi dua arah;
5. Mendorong petani-nelayan untuk belajar dari pengalaman dan penemuan mereka sendiri.

Partisipasi dalam penyuluhan pertanian perlu dikembangkan sesuai dengan ciri-ciri penyuluhan pertanian itu sendiri. **Tahapan partisipasi** petani-nelayan dalam penyuluhan pertanian mulai dari kesediaan untuk **datang, mendengar, berkomunikasi searah, berkomunikasi dua arah (interaktif), membangun kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama, membuat keputusan, berbagi resiko, bermitra, sampai mampu mengelola sendiri.**

Keberhasilan petani-nelayan dan keluarganya untuk mampu mengelola sendiri program dan kegiatan mereka dan untuk dapat bertindak selaku subjek (pelaku utama) dalam pembangunan pertanian tidak akan datang secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan atau tingkatan bentuk partisipasi sebagaimana diuraikan di atas.

Untuk itu para penyuluh pertanian dan petugas terkait lainnya harus dapat menyesuaikan sikap dan perilaku serta mental mereka sedemikian rupa, sehingga suasana belajar yang partisipatif dan demokratis tersebut terwujud.

II. TUJUAN DAN KELUARAN PENERAPAN PENDEKATAN PENYULUHAN PARTISIPATIF

Penerapan pendekatan penyuluhan pertanian partisipatif sangat strategis sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem solving capacity*) dan pemberdayaan (*empowerment*) petani-nelayan dan keluarganya dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemitraan, keterbukaan, kesetaraan kewenangan dan tanggungjawab, serta kerjasama.

Untuk itu perubahan yang paling mendasar yang diperlukan adalah perubahan terhadap pola "guru-murid" diantara penyuluh dan petani-nelayan beserta keluarganya. Tugas para penyuluh pertanian dan petugas terkait lainnya bukan untuk "mengajar" petani-nelayan dan keluarganya, melainkan "mengajak" mereka untuk melibatkan diri di dalam suatu proses pendidikan (*non-formal*). Peran para penyuluh pertanian dan petugas terkait lainnya sebagai fasilitator (*pemandu*) dan mitra seajar petani-nelayan, bukan sebagai guru, menuntut mereka untuk menyatu dan meratakan diri dengan petani-nelayan dan keluarganya sebagai prasyarat untuk terjadinya suatu proses interaksi yang dialogis, seimbang dan langsung di tengah-tengah "wadah/kelas belajar".

Dengan demikian dalam penyuluhan pertanian partisipatif tidak lagi dikenal istilah "mengajar", namun "menciptakan kesempatan" agar para petani-nelayan beserta keluarganya bisa belajar sendiri dan menemukan sendiri. Dalam proses ini petani-nelayan diberi kesempatan untuk memimpin kelompok, menyajikan hasil, memimpin diskusi, dan menyelenggarakan eksperimen (*kajian-kajian lapangan*). Dengan demikian, proses yang terjadi bukan sekedar "belajar dari pengalaman" (*learning by doing*) tetapi suatu proses belajar yang memungkinkan seluruh peserta belajar yang semuanya orang dewasa dapat menguasai suatu proses "penemuan ilmu" (*discovery learning*) yang dinamis dan dapat diterapkan dalam manajemen usahatani maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, maka tujuan dan keluaran dalam penerapan metode penyuluhan pertanian partisipatif adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Terwujudnya pengusaha tani-nelayan yang mandiri dan efisien;
2. Terwujudnya petani-nelayan yang mampu melayani sesama petani-nelayan melalui kegiatan penyuluhan pertanian dari, oleh dan untuk mereka sendiri.

B. Keluaran

Dengan diterapkannya penyuluhan pertanian partisipatif diharapkan:

1. Petani-nelayan mampu mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada di sekitarnya secara menguntungkan dan berkelanjutan;
2. Petani-nelayan mampu memanfaatkan sumber-sumber informasi dan mampu mengembangkan informasi dari pengalamannya sendiri untuk merencanakan dan mengembangkan usahatannya;
3. Petani-nelayan mampu memanfaatkan peluang-peluang ekonomi untuk mengembangkan usahatannya;
4. Petani-nelayan mampu bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengembangan usahanya;
5. Petani-nelayan mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi lokal/kearifan lokal (*indigenous technology/local wisdom*);
6. Petani-nelayan bersedia dan mampu mengenali petani-nelayan lain baik masalah, potensi maupun aspirasinya,
7. Petani-nelayan bersedia dan mampu memotivasi petani-nelayan lain ke arah kemajuan;
8. Petani-nelayan bersedia dan mampu memanfaatkan potensi dan pengaruh orang/pihak lain untuk mengajak masyarakat tani ke arah kemajuan.

Tujuan dan keluaran yang disebutkan di atas tidaklah keluar dari ruang lingkup penyuluhan pertanian, yaitu:

1. Bertani lebih baik (produksi tanaman pangan, pepohonan, ternak, ikan, kesuburan tanah, kelestarian lingkungan dan pengawetan air);
2. Berusahatani lebih menguntungkan (pengusahaan/ manajemen usahatani, pengolahan dan penyimpanan hasil, penilaian pasar, kerjasama ekonomi dan pemasaran);
3. Hidup lebih sejahtera (makanan dan gizi, kesehatan dan kebersihan, perumahan dan keindahan);
4. Lingkungan lebih baik (konservasi lahan, ketersediaan sumber daya alam/flora/fauna, daya dukung lingkungan);
5. Bermasyarakat lebih baik (aktivitas sosial, memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, mendapat manfaat dari pelaksanaan program pembangunan).

III. PRINSIP-PRINSIP DAN CIRI-CIRI PENYULUHAN PERTANIAN PARTISIPATIF

A. Prinsip-prinsip Penyuluhan Partisipatif

Penyuluhan pertanian partisipatif diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip: (1) menolong diri sendiri (*self-help*), (2) partisipasi, (3) kemitrasejajaran (*egaliter*), (4) demokrasi, (5) keterbukaan, (6) desentralisasi, (7) kemandirian/keswadayaan, (8) akuntabilitas, (9) menemukan sendiri dan spesifik lokasi, (10) membangun pengetahuan dan (11) kerjasama dan koordinasi.

Prinsip-prinsip tersebut secara ringkas dijelaskan berikut ini:

1. Prinsip menolong diri sendiri (*self-help*)

Prinsip menolong diri sendiri (*self-help*) memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian partisipatif membangun kapasitas dan kemampuan petani-nelayan beserta keluarganya dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk menolong diri sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain atau tergantung kepada pihak luar.

2. Prinsip partisipasi

Prinsip partisipasi memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian partisipatif melibatkan petani-nelayan beserta mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi. Wujud keterlibatan tersebut adalah kesadaran dan kemauan mereka untuk datang, mendengar, berkomunikasi searah, berkomunikasi dua arah (*interaktif*), membangun kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama, membuat keputusan, berbagi resiko, bermitra, sampai mampu mengelola sendiri.

3. Prinsip kemitrasejajaran (*egaliter*)

Prinsip *egaliter* memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian partisipatif diselenggarakan berdasarkan atas kesamaan kedudukan antara penyuluh dengan petani-nelayan dan keluarganya.

Dengan demikian penyuluh pertanian mempunyai kedudukan sebagai mitra sejajar petani-nelayan dan keluarganya;

4. Prinsip demokrasi

Prinsip demokrasi memberikan landasan bahwa dalam penyuluhan pertanian partisipatif seluruh kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi diselenggarakan dari petani, oleh petani dan untuk petani.

5. Prinsip keterbukaan

Prinsip keterbukaan memberikan landasan bahwa dalam penyuluhan pertanian partisipatif seluruh kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi diselenggarakan secara terbuka. Setiap petani-nelayan mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan informasi, sehingga timbul rasa saling percaya dan kepedulian yang besar.

6. Prinsip desentralisasi

Prinsip desentralisasi memberi landasan bahwa penyuluhan partisipatif mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

7. Prinsip keswadayaan

Prinsip keswadayaan memberi landasan bahwa penyuluhan partisipatif mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi diselenggarakan atas dasar swadaya petani-nelayan dan keluarganya yang diwujudkan dengan cara menyumbangkan tenaga, dana, dan material yang mereka miliki untuk melaksanakan semua kegiatan.

8. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas memberi landasan bahwa penyuluhan partisipatif mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi dipantau dan diawasi oleh petani-nelayan beserta keluarganya serta masyarakat tani lainnya.

9. Prinsip menemukan sendiri dan spesifik lokasi

Prinsip menemukan sendiri dan spesifik lokasi memberi landasan bahwa penyuluhan partisipatif bukan hanya sekedar media transfer paket teknologi untuk diadopsi oleh petani-nelayan beserta keluarganya. Sebaliknya, penyuluhan partisipatif ditujukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat tani setempat dalam proses penciptaan dan pengembangan inovasi melalui kegiatan studi/kajian yang dilakukan oleh mereka sendiri, mulai dari penggalian informasi mengenai aspek bio fisik (agroklimat), sosial dan ekonomi sampai dengan penyebaran pengetahuan, pengalaman dan teknologi lokal (*indigenous technology*) yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan potensi wilayah masing-masing. Termasuk juga di sini kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan kearifan lokal (*local wisdom*). Kegiatan ini selanjutnya dimaksudkan untuk membuat rencana usaha keluarga yang didukung oleh rencana kegiatan kelompok, rencana kegiatan desa dan kecamatan serta kabupaten.

10. Prinsip membangun pengetahuan

Prinsip membangun pengetahuan memberi landasan bahwa penyuluhan partisipatif diselenggarakan untuk memperkuat kegiatan wadah/kelas belajar petani-nelayan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, sikap dan perilaku positif, membangun ethos kerja keras, produktif, efisien, disiplin dan jiwa serta semangat kewirausahaan yang pandai melihat serta memanfaatkan peluang serta pantang menyerah atau putus asa.

Dengan prinsip ini petani-nelayan beserta keluarganya didorong untuk menjadi manusia pembelajar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok/organisasi dan masyarakatnya.

11. Prinsip kerjasama dan koordinasi

Prinsip kerjasama dan koordinasi memberi landasan bahwa penyuluhan partisipatif diselenggarakan atas dasar kerjasama dan koordinasi yang intensif baik di antara peneliti, penyuluh dan petani-nelayan beserta keluarganya serta masyarakat tani lainnya, maupun dengan pihak-pihak terkait baik. Kerjasama dan koordinasi ini dilakukan secara perorangan maupun melalui kelembagaan, baik perusahaan swasta, LSM, Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga penelitian, Dinas-dinas lingkup dan luar sektor pertanian maupun lainnya. Kerjasama dan koordinasi ini dilaksanakan secara terpadu dan berorientasi kepada kebutuhan petani-nelayan beserta keluarganya, sehingga memberi efek saling memperkuat bagi upaya pemberdayaan petani-nelayan dan keluarganya.

B. Ciri-Ciri Penyuluhan Pertanian Partisipatif

Ciri-ciri penyuluhan partisipatif adalah: (1) belajar langsung dari petani-nelayan/masyarakat tani, (2) penyuluh sebagai fasilitator dan mitra sejajar petani-nelayan dan keluarganya, (3) saling belajar dan berbagi pengalaman, (4) melibatkan semua kelompok masyarakat, (5) non formal dan demokratis, (6) menghargai perbedaan, (7) triangulasi, (8) belajar dari kesalahan, (9) mengoptimalkan hasil, (10) Pendekatan dari bawah (*bottom-up*), tanggap terhadap isu gender dan kelompok terpinggirkan (*marginal*), (11) menyeluruh (*wholistic*), (12) berorientasi praktis, (13) berlanjut. Ciri-ciri tersebut secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

1. Belajar secara langsung dari petani-nelayan/ masyarakat tani

Prinsip yang paling mendasar dalam penyuluhan partisipatif adalah pengakuan serta kepercayaan akan potensi dan kemampuan petani-nelayan beserta keluarganya serta masyarakat tani pada umumnya dalam memecahkan masalah mereka sendiri.

2. Penyuluh sebagai mitra sejajar petani-nelayan dan keluarganya
Dalam penyuluhan partisipatif penyuluh bukan berperan untuk “mengajar” petani-nelayan dan keluarganya, melainkan “mengajak” mereka untuk melibatkan diri di dalam suatu proses pendidikan (non-formal). Penyuluh menyatu dan meratakan diri dengan petani-nelayan dan keluarganya sebagai prasyarat untuk terjadinya suatu proses interaksi yang dialogis, seimbang dan langsung di tengah-tengah “wadah/kelas belajar” atau berkedudukan sebagai mitra sejajar petani-nelayan dan keluarganya
3. Saling belajar dan saling berbagi pengalaman
Pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh petani-nelayan dan keluarganya akan mewujudkan suatu proses saling belajar dan berbagi pengalaman antara petani-nelayan beserta keluarganya dan penyuluh dalam suatu proses komunikasi dua arah yang seimbang.
4. Melibatkan semua kelompok masyarakat
Masyarakat bukanlah suatu kumpulan orang-orang yang homogen, tetapi terdiri dari berbagai kelompok yang mempunyai aspirasi, harapan, masalah dan kepentingan masing-masing. Anggapan bahwa pimpinan formal, tokoh masyarakat atau kelompok tertentu dapat mewakili seluruh masyarakat merupakan kekeliruan yang seringkali dilakukan. Untuk mencegah bias dan memperoleh dukungan dari masyarakat luas, penyuluhan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua golongan masyarakat. Hal ini dimulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur dalam masyarakat tani dan unsur-unsur dalam rumah tangga tani-nelayan, kemudian mencoba memahami peran, harapan, aspirasi serta kepentingan masing-masing unsur dalam masyarakat dan rumah tangga tani tersebut dalam pembangunan pertanian. Dengan demikian program penyuluhan pertanian yang disusun mampu merespon berbagai kebutuhan dari berbagai kelompok dalam masyarakat yang ada.

5. Non formal dan demokratis

Penyuluhan partisipatif diselenggarakan dalam suasana yang bersifat luwes, terbuka, tidak memaksa dan non formal. Suasana belajar yang akrab, penuh rasa kekeluargaan dan nuansa kesetaraan serta kemitraan akan menumbuhkan iklim belajar yang demokratis dan mendorong pengembangan kreativitas petani-nelayan beserta keluarganya secara optimal.

6. Menghargai perbedaan

Unsur-unsur dalam masyarakat tani dan unsur-unsur dalam rumah tangga tani-nelayan boleh jadi memiliki pandangan, aspirasi dan harapan yang berbeda-beda. Dalam penyuluhan partisipatif, perbedaan-perbedaan ini perlu dihargai dan diakomodasi dengan baik, sehingga program penyuluhan pertanian dapat disusun untuk merespon sebanyak mungkin perbedaan yang ada, walaupun tetap dengan membuat skala prioritas.

7. Triangulasi

Metoda partisipatif berupaya untuk mengumpulkan dan menganalisa data secara sistematis bersama-sama petani-nelayan beserta keluarganya dan masyarakat tani dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada.

Untuk mendapatkan informasi yang dapat diandalkan kebenarannya dapat dilakukan triangulasi yang merupakan bentuk "pemeriksaan dan pemeriksaan ulang" (*check and re-check*). Triangulasi dapat dilakukan melalui penganejaragaman unsur-unsur keanggotaan tim (latar belakang profesi/ disiplin ilmu/pengalaman), penganejaragaman sumber informasi (latar belakang sumber informasi utama dan tempat asalnya) dan variasi dalam teknik-teknik yang digunakan untuk menggali data dan informasi.

8. Belajar dari kesalahan

Metoda dan teknik-teknik yang partisipatif bukanlah suatu perangkat teknik yang telah selesai, sempurna dan pasti benar. Metoda dan teknik-teknik ini diharapkan senantiasa dapat terus dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.

Berbuat suatu kesalahan/kekurangan merupakan sesuatu yang biasa dalam proses belajar partisipatif karena dengan belajar dari kesalahan/kekurangan, seseorang akan dapat memperbaiki dirinya.

9. Mengoptimalkan hasil

Pelaksanaan kegiatan partisipatif memerlukan waktu dan tenaga, narasumber, pelaksana yang terampil dan partisipasi petani-nelayan beserta keluarganya, yang secara keseluruhan berkaitan dengan ketersediaan waktu, tenaga dan dana. Oleh karena waktu, tenaga serta dana yang dimiliki seringkali terbatas, maka tidak ada pilihan selain melaksanakan kegiatan penggalan data dan informasi dengan sikap yang cermat dan realistis, sehingga dapat diraih hasil yang optimal.

10. Pendekatan dari bawah (*bottom-up*), tanggap terhadap isu jender dan kelompok yang terpinggirkan (*marginal*)

Penyuluhan pertanian hendaknya berorientasi kepada kebutuhan petani-nelayan beserta keluarganya. Oleh sebab itu, peranserta aktif petani-nelayan beserta keluarganya merupakan hal yang sangat penting dalam semua tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi. Partisipasi kaum perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah, terisolasi, kelompok yang rawan baik dari segi sandang, pangan, sosial, kesehatan, dan lain-lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyuluhan pertanian partisipatif. Untuk itu aspirasi dan kepentingan kaum perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan (*marginal*) perlu diakomodasi dengan baik, sehingga pelaksanaan program penyuluhan pertanian dapat merespon dan memberi manfaat serta dampak yang optimal terhadap kaum perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan tersebut.

11. Menyeluruh (*wholistic*)

Penyuluhan pertanian tidak hanya berfokus pada proses atau metoda-metoda penyuluhan pertanian yang eksternal tetapi juga proses-proses

internal seperti manajemen, koordinasi, komunikasi dan secara teknis tidak hanya berfokus pada satu sub sektor saja, namun terpadu dan berorientasi kepada aspirasi petani-nelayan beserta keluarganya.

12. Orientasi praktis

Penyuluhan partisipatif berorientasi praktis, yaitu ditujukan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan upaya-upaya pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada. Untuk itu dibutuhkan informasi yang relevan dan memadai. Metoda dan teknik yang partisipatif mencoba untuk meningkatkan kualitas program penyuluhan pertanian yang sedang dikerjakan atau yang baru akan dikembangkan sehingga memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat tani dalam memecahkan masalah-masalah mereka sendiri.

13. Berlanjut

Kepentingan-kepentingan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani-nelayan beserta keluarganya tidaklah tetap, tetapi berubah dan bergeser dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat tani itu sendiri. Karenanya, pengenalan masyarakat tani bukanlah suatu usaha yang sekali dilakukan kemudian selesai, namun merupakan suatu usaha yang berlanjut. Hal ini perlu dihayati oleh lembaga dan para pelaksana di lapangan, agar program penyuluhan pertanian yang dikembangkan dapat selalu disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya kegiatan pemberdayaan petani-nelayan beserta keluarganya perlu dilakukan dengan menggalakkan kontribusi masyarakat sendiri, baik berupa tenaga, dana maupun material guna menumbuhkan sikap dan perilaku serta kemampuan untuk secara bertahap mampu menolong diri mereka sendiri. Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi mereka dan inisiasinya dilakukan oleh pihak-pihak luar dapat diteruskan pelaksanaannya oleh petani-nelayan beserta keluarganya dan masyarakat tani secara berlanjut (*self propelling growth*).

Beberapa contoh metodologi penyuluhan partisipatif yang telah dan sedang dikembangkan digambarkan pada matriks terlampir.

IV. STRATEGI PENYELENGGARAAN

Strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian partisipatif ditempuh melalui beberapa langkah yaitu : (1) membangun kemitraan diantara seluruh *stakeholders* (petani, pemerintah, swasta, LSM); (2) mengembangkan lembaga penyuluhan pertanian menjadi organisasi pembelajaran; (3) mengembangkan pendekatan kesisteman yang menyeluruh/*wholistic* (dari hulu sampai hilir, lintas subsektor dan sektoral); (4) membangun penyuluh pertanian yang mengacu kepada kebutuhan petani-nelayan (*farmers' demand driven*); (5) menjadikan petani sebagai aktor/pelaku pembangunan pertanian; (6) menciptakan struktur penyuluhan pertanian yang sependek mungkin (debirokratisasi).

A. Membangun kemitraan di antara seluruh *stakeholders* (petani, pemerintah, swasta, LSM):

1. Mengembangkan sistem dan mekanisme kemitraan usahatani yang saling menguntungkan;
2. Meningkatkan keterampilan petani-nelayan dan posisi tawar mereka dalam melakukan negosiasi dengan pihak-pihak lain;
3. Mengembangkan usahatani unggulan spesifik lokasi yang didukung oleh kegiatan penelitian;
4. Mempersiapkan kader-kader pengusahatani-nelayan yang mampu mengantisipasi peluang agribisnis.

B. Mengembangkan lembaga penyuluhan pertanian untuk menjadi organisasi pembelajaran:

1. Mengembangkan minat dan perilaku belajar penyuluh dan petani yang inovatif secara terus-menerus melalui pelaksanaan studi-studi/kajian/ekperimen petani-nelayan;
2. Mengembangkan peran lembaga penyuluhan sebagai pelayan jasa informasi dan komunikasi penyuluhan pertanian serta pelayanan konsultasi agribisnis;
3. Mengembangkan wahana/kelas belajar petani dalam melaksanakan pengembangan usahatani unggulan spesifik lokasi;
4. Mengembangkan sentra-sentra pembelajaran agribisnis di wilayah kabupaten/kota;
5. Memfasilitasi pengembangan laboratorium penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani-nelayan sendiri;

6. Mengembangkan pusat-pusat pelatihan dan pertanian swadaya yang dikelola oleh petani-nelayan sendiri;
7. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi lokal/kearifan lokal.

C. Mengembangkan pendekatan kesisteman yang menyeluruh atau *wholistic* (dari hulu sampai hilir, lintas subsektor dan sektoral):

Strategi penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan kesisteman yang menyeluruh (*wholistic*), mulai dari hulu hingga hilir secara terpadu, termasuk pendekatan kelembagaan yang melayani agribisnis, yaitu kelembagaan pemasaran, keuangan, penelitian, pendidikan, pelatihan, dan infrastruktur (jalan-jalan usahatani sampai ke pelabuhan, irigasi, gudang/silo, sarana air bersih, dan lain-lain) guna optimalisasi pemanfaatan sumberdaya. Dengan demikian paradigma pembangunan pertanian yang bergeser menjadi pembangunan sistem dan usaha agribisnis menuntut pendekatan yang bersifat antarsektoral.

D. Membangun penyuluh pertanian yang mengacu kepada kebutuhan petani-nelayan (*farmers' demand driven*).

Pendekatan penyuluhan pertanian partisipatif harus didasarkan kepada kebutuhan petani-nelayan itu sendiri. Penyuluh harus mampu menggali dan menangkap aspirasi petani-nelayan beserta keluarganya dan meresponnya dengan menyediakan jasa pendidikan non formal yang diminta atau dibutuhkan. Penyuluhan pertanian yang mengacu kepada kebutuhan petani-nelayan beserta keluarganya tersebut (*farmers' demand driven*) harus selalu ditujukan untuk kepuasan petani-nelayan yang dilayani. Karena itu perlu dikembangkan program penyuluhan pertanian dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk merespon kebutuhan, masalah-masalah yang dihadapi dan harapan-harapan mereka ke depan. Selanjutnya perlu dikembangkan metode dan instrumen-instrumen yang mengukur tingkat kepuasan petani (misalnya survei *farmers satisfaction*).

E. Menjadikan petani sebagai aktor/pelaku pembangunan pertanian

Pada hakekatnya pembangunan pertanian merupakan *people centered development* yang menempatkan petani sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek. Oleh

karena itu penyuluhan pertanian harus mendorong agar petani-nelayan beserta keluarganya mampu berperan sebagai pengambil prakasa, pengambil keputusan, perencana, pelaksana sampai pemantau dan pengevaluasi suatu program, proyek atau kegiatan. Sebaliknya, penyuluh harus mampu mendudukan diri sebagai mitra sejajar petani-nelayan beserta keluarganya dan memberikan fasilitasi (pendampingan) yang diperlukan oleh petani-nelayan beserta keluarganya.

- F. Menciptakan struktur penyuluhan pertanian yang sependek mungkin (debirokratisasi)

Struktur organisasi penyuluhan pertanian di masa depan hendaknya lebih pendek dari mata rantai yang ada dewasa ini, sehingga petani-nelayan beserta keluarganya dapat dengan cepat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tanpa menunggu pelayanan yang panjang dan berbelit-belit. Petani-nelayan perlu diberi kesempatan dan didorong untuk mampu menjadi penyelenggara (pengelola) kegiatan penyuluhan bagi rekan-rekan mereka, sesama petani-nelayan, dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar mengorganisasi kegiatan-kegiatan di lapangan, dari oleh dan untuk mereka sendiri, baik berupa kegiatan studi/kajian/eksperimen, temu teknologi lapang, demonstrasi, temukarya magang sesama petani, temu wicara, temu usaha, pameran/promosi, kursus tani, sekolah lapang, dan lain-lain. Dengan memberi kepercayaan dan kesempatan-kesempatan untuk mengelola kegiatan-kegiatan penyuluhan di lapang, dari oleh dan untuk mereka sendiri, maka struktur penyuluhan pertanian menjadi lebih pendek dan keberdayaan serta kemandirian petani-nelayan akan lebih cepat terwujud.

V. INDIKATOR KUALITAS PENYULUHAN PARTISIPATIF

A. Indikator Tujuan

1. Kenaikan produktivitas usahatani dan pendapatan petani-nelayan dan keluarganya;
2. Bertambahnya jumlah petani-nelayan beserta keluarganya yang meningkat pengetahuan, keterampilan, wawasan, sikap, perilaku dan ethos kerjanya dalam pembangunan masyarakat tani dan pedesaan pada umumnya.
3. Bertambahnya jumlah petani-nelayan beserta keluarganya yang datang, mendengar, berkomunikasi searah, berkomunikasi dua arah (interaktif), membangun kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama, membuat keputusan, berbagi resiko, bermitra, sampai mampu mengelola sendiri usahatani keluarganya, termasuk mereka yang berasal keluarga-keluarga berpenghasilan rendah, kaum perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat (marginal);
4. Meningkatnya umpan balik dari petani-nelayan beserta keluarganya terhadap kebijakan pemerintah, baik terhadap program penelitian, penyuluhan maupun program pembangunan pertanian secara umum, yang bermanfaat untuk perbaikan pelayanan dan pedampingan (fasilitasi) selanjutnya bagi petani-nelayan beserta keluarganya;
5. Adanya perluasan jaringan petani-nelayan, baik secara perseorangan, kelompok atau melalui berbagai bentuk kelembagaan petani-nelayan lainnya, dengan berbagai kelembagaan agribisnis, seperti lembaga pemasaran hasil, keuangan, penelitian, pendidikan pelatihan, dan infrastruktur, baik pemerintah maupun swasta/LSM;
6. Bertambahnya jumlah petani-nelayan dan keluarganya yang menjadi petani pemandu, pengelola Pusat Pelatihan dan Pertanian Swadaya (P4S), manajer sentra-sentra pembelajaran agribisnis dan atau aktivitas-aktivitas lainnya yang menunjukkan

kepeloporan mereka dalam menggerakkan pembangunan masyarakat tani dan pedesaan pada umumnya.

B. Indikator Keluaran

1. Bertambahnya jumlah petani-nelayan dan keluarganya yang mampu menyusun profil usahatani dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitarnya secara mengunungkan dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut :
 - 1). Kemampuan dalam menyusun profil keluarga tani;
 - 2). Kemampuan dalam menyusun profil desa;
 - 3). Kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam usahatani dan dalam memberikan alternatif pemecahannya;
 - 4). Kemampuan dalam membuat kalender kerja untuk laki-laki dan perempuan, serta profil akses dan kontrolnya;
 - 5). Kemampuan dalam mengumpulkan informasi baik secara perorangan maupun dalam tim/kelompok.
2. Bertambahnya jumlah petani-nelayan dan keluarganya yang mampu merencanakan usahatani keluarganya, sebagai berikut :
 - 1). Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis potensi wilayahnya serta merencanakan usahatani keluarganya;
 - 2). Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis potensi wilayahnya dan merencanakan kegiatan kelompok;
 - 3). Kemampuan menyusun rencana kegiatan desanya secara bersama-sama;
 - 4). Kemampuan menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian bagi sesama petani;
3. Bertambahnya jumlah petani-nelayan dan keluarganya yang mampu melaksanakan agribisnis keluarga, kelompok/ masyarakat, sebagai berikut :
 - 1). Kemampuan melaksanakan agribisnis keluarga sesuai dengan rencana yang telah disusun;

- 2). Kemampuan melaksanakan agribisnis kelompok/ masyarakat sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama;
- 3). Kemampuan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian kepada sesama petani-nelayan baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak swasta atau LSM dengan menggunakan berbagai metode penyuluhan pertanian antara lain: pelatihan atau sekolah lapangan, kajian/studi petani, kunjungan, jaringan kerja petani, media informasi dan kursus tani atau sekolah lapang petani dengan materi/kurikulum yang dikembangkan bersama-sama dengan petani-nelayan yang bersangkutan;
4. Bertambahnya jumlah petani-nelayan dan keluarganya yang mampu melaksanakan kegiatan penilaian sendiri terhadap usahatani, sebagai berikut:
 - 1). Kemampuan mengevaluasi usahatani keluarga sesuai dengan rencana yang telah disusun;
 - 2). Kemampuan mengevaluasi kegiatan kelompok/ masyarakat desa;
 - 3). Kemampuan mengevaluasi kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana yang telah disusun.
5. Bertambahnya jumlah petani-nelayan dan keluarganya yang mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia pada berbagai lembaga maupun perorangan untuk kemajuan usahatani.
6. Bertambahnya jumlah petani-nelayan dan keluarganya yang menjangkau sumber-sumber permodalan yang tersedia pada lembaga-lembaga keuangan dan perbankan (menjadi nasabah terpercaya).
7. Bertambahnya jumlah petani-nelayan dan keluarganya yang memanfaatkan dan melakukan pengembangan teknologi lokal/ kearifan lokal (*indigenous technology local wisdom*) melalui kegiatan studi/kajian/ekperimen di lapangan.

VI. PENUTUP

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang selama ini dilakukan lebih berat kepada pendekatan dari atas dan bersifat sentralistik, sehingga belum terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip dan ciri-ciri penyuluhan partisipatif yang berfokus kepada petani-nelayan. Namun demikian, otonomi daerah telah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada petani-nelayan beserta keluarganya untuk berperanserta aktif dalam dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah masing-masing.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian partisipatif, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan pertanian yang diselenggarakan melalui pendekatan dari atas (*top-down*) sudah tidak dapat dipertahankan untuk memberdayakan petani.
2. Penyelenggaraan penyuluhan tersebut harus kembali kepada prinsip-prinsip dan ciri-ciri penyuluhan pertanian yang sebenarnya melalui pendekatan partisipatif.
3. Tujuan akhir penyuluhan pertanian partisipatif adalah untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan peran aktif petani-nelayan beserta keluarganya dalam melaksanakan usahatani yang menguntungkan, inovatif dan berkelanjutan.
4. Keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus didasari pada prinsip-prinsip dan ciri-ciri penyuluhan pertanian partisipatif dengan menggunakan metoda dan teknik-teknik partisipatif.
5. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan pertanian harus diubah orientasinya yaitu dari pendekatan instruktif ke partisipatif.
6. Keberhasilan penyuluhan pertanian dapat dilihat melalui berbagai indikator yang menunjukkan seberapa jauh para petani-nelayan dan masyarakat tani lainnya telah meningkat peran dan kemampuannya dalam bertani lebih baik, berusahatani lebih baik, hidup lebih sejahtera, memelihara lingkungan dan bermasyarakat secara lebih baik.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian partisipatif seperti tersebut di atas tidaklah mungkin dapat berhasil tanpa adanya kesatuan persepsi dan gerak yang terkoordinasi diantara berbagai pihak dan aparat yang terkait. Oleh karena itu kunci keberhasilan penyuluhan pertanian partisipatif adalah **kepedulian dari sumberdaya manusia penyelenggara penyuluhan pertanian**

dan penyelenggara pembangunan pertanian untuk selalu konsisten dalam menyikapi perubahan sikap mental dan perilaku yang menjiwainya dan mengoperasionalkan secara benar pula.

Matriks Beberapa Metodologi Penyuluhan Partisipatif

NO	METODOLOGI PENYULUHAN PARTISIPATIF	PROSES PERENCANAAN USAHA/TANI/AGRI-BISNIS KELUARGA	CIRI-CIRI	PRINSIP-PRINSIP	STRATEGI	SASARAN DAN LOKASI	KETERANGAN
<p>PASIG (Partnery Approaches to Sustainable Income Generation) atau yang dikenal dengan PROSPEK (Proses Penyuluhan Kemitraan), metodologi yang diadopsi penerapannya</p>	<p>1. Perencanaan Partisipatif (PRA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis agribisnis keluarga • Menganalisis rencana kegiatan kelompok • Menganalisis rencana kegiatan masyarakat • Menganalisis rencana penyuluhan desa • Menganalisis rencana penyuluhan kecamatan <p>2. Analisis Jender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi potensi pria dan wanita dalam agribisnis keluarga <p>3. Analisis Finansial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui kelayakan usaha dan memilih usaha yang menguntungkan 	<p>a) Disiapkan desa atau petan/pemula atau fasilitator desa yang dipilih oleh masyarakat</p> <p>b) Duta untuk kegiatan penyuluhan ide-ide ditunjuk oleh masyarakat</p> <p>c) Pengenthan agribisnis kelompok pada agribisnis keluarga sebagai unit ekonomi dasar</p> <p>d) Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara terus-menerus untuk keluarga, kelompok dan masyarakat</p> <p>e) Adanya kemitraan antara petani dengan kelompok lain dalam kelompok, atau antara organisasi petani dengan organisasi lain</p>	<p>1) Pengenthan usaha dan penyuluhan penyuluhan memerlukan pengenthan jaringan informasi dan kegiatan serta kemitraan usaha</p> <p>2) Petani mampu meningkatkan produksi usahanya bila didukung oleh kesediaan, ketekaduan, kreativitas dan kepekaan terhadap lingkungan</p> <p>3) Setiap kelompok dibuat secara partisipatif dan demokratis</p> <p>4) Setiap keluarga yang membina usaha-besarnya, potensi dan masalah usahanya</p> <p>5) Setiap kelompok memiliki rencana usahanya sendiri yang rasional dan menguntungkan serta finansial secara berkala dan partisipatif dengan anggota keluarga</p> <p>6) Kegiatan sejenis dari berbagai besar keluarga dilaksanakan secara berkelompok dan ada bentuk masyarakat desa untuk keluarga ditubuhkan dan dicetus</p> <p>Prinsip-prinsip penyuluhan dan ditubuhkan oleh rencana pelaksanaan dan hasil usaha berkala dan partisipatif</p>	<p>(1) Mengembangkan kemampuan petan/pemula dan kegiatan belajar petan/pemula dengan berorientasi pada nilai-pengalaman agribisnis yang, penyuluhan, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian</p> <p>(2) Meningkatkan kemampuan keluarga untuk untuk mengelola agribisnis keluarga secara rasional dan menguntungkan</p> <p>(3) Meningkatkan kemampuan dan memperbaiki mental dan sikap keluarga lain untuk membina dan bekerjasama dalam kelompok dan jaringan yang lebih luas</p> <p>(4) Membentuk dan meningkatkan kemampuan diri fasilitator atau petan/pemula di setiap desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat setempat untuk memantapkan belajar dan mengelola dana desa untuk kegiatan penyuluhan atau belajar petan/pemula</p> <p>(5) Mendirikan dan mengembangkan wadah belajar petan/pemula untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar, membina dan interaksi dengan petan/pemula dan petan/pemula di setiap desa secara berkelompok</p>	<p>A. SASARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga unit • Petan/pemula • Instruktur desa • Kelompok unit • Proyek dan Petanian <p>B. LOKASI</p> <p>30 desa dalam 4 (empat) kecamatan di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kab. Muba, Kabupaten Uluu dan Kab. Kotabaru, Sulawesi Tenggara dan sedang diuji cobakan pada penerapannya di 11 (satu) kabupaten</p>	<p>Telah diterbitkan 21 modul Panduan Pembelajaran PROSPEK</p>	

<p>KUP (Kultur) dan Upland Farming System Development Project)</p>	<p>Prinsip-prinsip dan diorientasikan kepada peningkatan produktivitas pertanian secara partisipatif, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis keadaan 2. Mengembangkan konsep model-model dan alat alat kerja 3. Menguji dan memperluas model-model yang telah dikembangkan. 4. Melatih tenaga dan pihak-pihak terkait. 5. Memperkenalkan model alat kerja kepada pihak-pihak lain. 6. Mengembangkan dan memelihara model dan sistem sistem usahatani secara wholistic, dimana petani ditempatkan sebagai subjek dan independen. 	<p>0) Proyek tidak memberikan kredit kepada petani untuk membeli alat-alat, tetapi pelayanan (asuransi) asuransi tidak dengan petani.</p> <p>1) Berencana LSM sebagai alat untuk proyek dan penelitian, penelitian dan pelatihan dan pendampingan kepada petani.</p> <p>1) Penyediaan (informasi teknologi) sesuai kebutuhan dan keadaan setempat (spesifik lokasi). Penyediaan pendiri dan pihak-pihak terkait lain serta petani.</p> <p>2) Transparansi, komunikasi, menguji coba teknologi yang berasal dari pengalaman petani dan rekomendasi dari hasil penelitian lainnya.</p>	<p>1) Dalam membangun teknologi penyediaan kepada tenaga kerja meningkatkan petani atau bila tidak memungkinkan melakukan kegiatan petani sebagai dasar analisis dan pengujian lapangan.</p> <p>2) Petani kelompok dibentuk berdasarkan kebutuhan petani dan jenis usahanya (tidak berorientasi komoditas maupun kepentingan program dari luar).</p> <p>3) Petani kelompok dibentuk oleh kelompok bersama dari workshop/anggota yang didominasi oleh petani.</p> <p>4) Berkoordinasi dengan berbagai pemerintah serta yang terkait secara partisipatif dan memperhatikan aspek gender.</p>	<p>(1) Mempertahankan kemampuan dalam memperbaiki pengorganisasian usaha, pemondokan dan jaringan kerjasama.</p> <p>(2) Mendukung petani di dalam penyediaan layanan usaha lainnya.</p> <p>(3) Membantu petani dalam menyusun program penyediaan dan rencana kerja penyediaan. Membantu penyediaan dan pihak-pihak terkait lainnya di dalam mendukung layanan petani (pemberdayaan petani) kelompok.</p> <p>(4) Membantu penyediaan dan rencana kerja penyediaan.</p>	<p>A. SASARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petani • Kelompok • Penyuluh • Petugas • Dinas • Kelompok Petani • Persewaan usaha • LSM <p>B. LOKASI</p> <p>Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan</p>	<p>Telah meneliti dan buku-buku panduan, a.l.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PKT (Perencanaan Kehariyan Tahun) P5 (Program Penyuluhan) 2. Petani di Persewaan di RHP) 3. Rukun Petani 4. Seri Ferrisyl Kib 5. Buku Panduan Petani <p>Manajemen Keuangan Tanah (yang mengacu pada pengorganisasian kelompok) petanian secara partisipatif)</p>
--	---	--	--	---	---	--

<p>SI-UBA (Sekolah Lapangan Usaha Berorientasi Agribisnis)</p>	<p>Proses penerapan jawa agribisnis berbagai pendamping maupun ketahanan keagribisnisannya.</p>	<p>a) Menetapkan calon peserta agribisnis dalam perencanaan tingkat kelas b) Fasilitas/pemasaran agribisnis telah mengikat Diklat Pelatihan Dasar. c) Dukungan pemodal/ada usaha bersama dengan swasta dan Bank. d) Tim bimbingan baru mengikat Diklat Pelatihan, TOE.</p>	<p>1) Menetapkan metode pembelajaran yang sesuai (indragery). 2) Pelaksanaan kegiatan pada tingkat lapangan petani. 3) Persekolah masalah harus melibatkan unsur/instansi terkait. 4) Petani belajar dari pengalaman. 5) Duga keberhasilan pelung usaha yang lebih baik.</p>	<p>(1) Meningkatkan keterampilan dan persiapan petani (2) Memperoleh dukungan modal usaha dari mitra usaha/ Bank (3) Meningkatkan/mempertahar kemampuan belajar bagi petani.</p>	<p>A. SASARAN • Petani (pria, wanita, pemuda) • Jumlah anggota per kelompok 4-25 orang. • Penyuluhan pertanian. B. LOKASI 12 Propinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Bali, Sulawesi Selatan.</p>	<p>Trilogi pembelajaran Model Teknik Pemecahan Masalah Dalam Pelaksanaan Agribisnis Seri I - VIII</p>
--	---	---	--	--	---	---

<p>DELIVERI (Decentralized Livestock Services Project in Eastern Indonesia Project)</p>	<p>1. Dalam analisis kebutuhan dan pemecatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi manajemen program digunakan metode PRA. 2. Penelitian dapat dilakukan atas permintaan masyarakat</p>	<p>a. Jumlah anggota dalam kelompok dipukul dalam kelompok masing-masing b. Dibagikan permasalahan yang mengancam krede bergaji angsa dan kelompok c. Kegiatan persiapan kelompok, sehingga tidak mengalami kendala kepada bantuan flik pemerintah d. Kesempatan belajar terbuka, baru dan prakarsa sendiri. e. Dibagikan modul modul tertulis, akses informasi dan kelompok f. Jenis kegiatan pembelajaran tidak hanya bersifat tatap muka g. Tim bantuan kerja antara lain pengarah, pembantu tingkat pusat dan daerah berkoordinasi menyeluruh.</p>	<p>1) Cara pemetaan target grup menggunakan metode PRA. 2) Lima kegiatan pembelajaran per kegiatan tidak dilaksanakan, tapi disesuaikan dengan macam kegiatan. 3) Proses penutupan jenis kegiatan pembelajaran pendampingan dilaksanakan dengan keaktifan. 4) Instruksi pembelajaran pembelajaran dilaksanakan oleh Dinas terkait.</p>	<p>1) CLAP (Community Livestock Action Planning) mendukung kegiatan petani. 2) Pelayanan pengajaran TPKN alternatif menggunakan masalah kredekan hewan. 3) Pelatihan pendidikan partisipatif, TQM, PME, TOT bagi fasilitator tingkat pusat sampai dengan tingkat desa.</p>	<p>A. SASARAN • Pemenuh kebijakan • Petani. B. LOKASI 1. Propinsi Sulawesi Selatan: Kab. Bulukumba 2. Propinsi Sulawesi Utara: Kab. Bolaang Minggrolow dan Kab. Minahasa 3. Propinsi Sumatera Barat: Kab. Agam 4. Propinsi Jawa Tengah: Kab. Kebumen 5. Propinsi Kalimantan Timur: Kab. Balikpapan 6. Propinsi Sulawesi Tengah: Kab. Donggala 7. Propinsi Jambi: Kab. Batahari</p>	<p>• Program GOJODA DELIVERI: - Utusan dan Rencana Program 1996-97 • Delivery Project: - Menerima dan Pendekatan pendekatan yang Lebih Terpadu - Penyukhan Persewaan - Turun ke tanah secara langsung, Februari 1998 - Memberikan Pelayanan Berencana, Berencana - Mengembangkan Meringkaskan Pelayanan Lembaga Pemerintah Indonesia (Bismar).</p>
---	---	--	--	--	--	--

<p>SL - PHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu)</p>	<p>Analisa dan proses belajar dilakukan dengan partisipasi aktif (peserta serta semua pihak) termasuk dalam mengumpulkan data aktual lapangan, pengkajian data dan pengambilan keputusan mengenai manajemen lahan.</p>	<p>a. Penerimaan PHT mulai bersifat tanggap lokal. b. Pendidikan melalui dialog, diminta peserta didik menemukan sendiri ilmu melalui inkuiri langsung dengan fakta. c. Sarana belajar utama adalah suwah dan etologi lahan pertanian setempat, yang hidup dan dinamis. d. Peran penandu bukan "mengajar" tapi mengajak peserta untuk melibatkan diri didalam suatu proses pendidikan. e. Kegiatan analisis agro-ekosistem (mengekskplorasi lahan mereka sendiri berdasarkan keadaan ekologi lokal). f. Latihan sensus : dirancang untuk mengahili suatu siklus terapan secara utuh, dari lahan sampai pasien.</p>	<p>1. Peserta sebagai pelaku pemula, penanda dan manajer lahan yang ahli. 2. Pevarian berkelanjutan melalui proses pendidikan yang terpadu dapat diseringgarkan secara efektif di tingkat kelompokan.</p>	<p>(1) Mengembangkan tindakan PHT melalui : pengalaman langsung, analisis keadaan suwah, pengamblian keputusan. (2)Pecan menjadi ahli PHT.</p>	<p>A. SASARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puxni kelompok lapangan • Pevan lapangan (penanda, penanda SL-PHT, fasilitator, pengahbang) <p>B. LOKASI</p> <p>12 Propinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Yogyakarta.</p>
--	--	--	---	--	---

<p>PNK (Pembinaan Pringkat Pendapatan Perani- ndayas Kecil)</p>	<p>1. Pelaksanaan metode PRA umuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi lokasi bisnis dan permasalahan ekonomi) • Identifikasi usaha-usaha ekonomi skala kecil) • Identifikasi PNK <p>2. Survey M-1 untuk mengidentifikasi lokasi bisnis</p> <p>3. Survey M-2 untuk mengidentifikasi PNK calon warga bisnis</p> <p>4. Mendorong & membimbing PNK membentuk kelompok</p> <p>5. Survey rumah tangga anggota PNK</p> <p>6. Pelayanan menabung</p> <p>7. Pelayanan penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)</p> <p>8. Pelayanan menyalurkan dan mengembalikan kredit</p> <p>9. Pelayanan melakukan usaha bersama atau usaha singgisa KPK</p> <p>10. Pelayanan pemecatan & pembinaan kerangas kelompok</p> <p>11. Pelayanan pemastaran & teknologi sepaguna</p>	<p>Sistem penumbuhan & pengembangan PNK dilakukan dengan kegiatan- kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pra-penumbuhan KPK • Pra-kredit I *) • Pra-kredit II *) • Pra-kredit III **) • Pra-kredit IV **) <p>sampai Graduasi PNK ***)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip berkelompok 2. Prinsip pendekatan kemitraan 3. Prinsip keswadayaan 4. Prinsip kesatuan keluarga 5. Prinsip belajar mememikan sendiri (discovery learning) 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas (2) Pengembangan sumber permodalan (3) Penumbuhan dan pengembangan keterampilan petani-nelayan kecil (4) Pengembangan pasar dan teknologi tepat guna 	<p>A. SASARAN</p> <p>Keluarga petani- nelayan dengan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan yang bila ditinjau berada di bawah atau sama dengan 220 kg setara beras per orang per tahun.</p> <p>B. LOKASI</p> <p>Ditaksanakan di 8.239 desa, 12 propinsi (Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Riau, Sumel, Lampung, Bengkulu, Sumut, Sambur, DI Aceh, Solimg, Kalbar, NTT, Kabel, Sulbel)</p>	<p>Teliti mererivikasi, tahu-tahu poloman a.l. 1. Pedoman Pembudayaan dan Pembudayaan KPK 2. Metodologi Peninggalan- an Kemiskinan (Indonesia's Poverty Eradication Methodology)</p>
---	--	--	--	--	---	--

<p>VII DAJEP (Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan/ Diversified Agricultural and Forestry Extension Project)</p>	<p>1. Melakukan identifikasi masalah/keadaan dan potensi usahawan keluarga dengan PRA 2. Menyusun rencana, pelaksanaan, monitoring & evaluasi usaha/keluarga petani/kegiatan 3. Melakukan identifikasi masalah/keadaan dan potensi kehutanan 4. Menyusun rencana, pelaksanaan, monitoring & evaluasi kegiatan kelompok/kegiatan kehutanan 5. Melakukan identifikasi masalah/keadaan, dan potensi desa 6. Melakukan rencana, pelaksanaan, monitoring & evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan tingkat desa</p>	<p>a. Di setiap desa ada petani pemantau atau fasilitator desa yang dipilih oleh masyarakat b. Dana untuk kegiatan penyuluhan di desa dikelola oleh masyarakat c. Pengembangan agribisnis d. Kegiatan sebagai unit berpartekel pada agribisnis keluarga ekonomi dasar e. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara merata untuk keluarga, kelompok dan masyarakat f. Adanya komitmen antara petani dengan keluarganya dan dengan petani lain dalam kelompok, serta antara organisasi petani dengan organisasi lain g. Kegiatan belajar petani berpusat di desa</p>	<p>1. Membangun pengembangan ketahanan pertanian dan ketahanan lokalitas sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah 2. Mengembangkan kegiatan lain/ instansi terkait dalam membangun pengembangan pertanian dan ketahanan antara petani, sektor swasta dan pemerintah. 3. Melakukan pada pengembangan SDM laki-laki dan perempuan serta mendorong tumbuhnya usahawan yang berorientasi bisnis. 4. Kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan dilaksanakan secara terpadu. 5. Mengembangkan berbagai insentif petani dan mendukung peran aktif petani dengan metode belajar melalui pengalaman dan pertemuan (discovery learning). 6. Mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan dengan kepada kepentingan petani. 7. Mendukung komersialisasi petani agar mampu meningkatkan dirinya sendiri dalam mengembangkan usahanya.</p>	<p>1. Memberdayakan petani agar mampu mengidentifikasi prioritas usahawan 2. Mengembangkan pemantau petani dalam program penyuluhan terpadu di tingkat kecamatan dan kabupaten. 3. Memperkerjakan pembaharuan/pemeliharaan dalam sistem penyuluhan staf penyuluhan/konsep/staf penyuluhan kabupaten 4. Memperkuat ketahanan penyuluhan nasional 5. Memperkuat sistem penabang penyuluhan pusat.</p>	<p>A. SASARAN <ul style="list-style-type: none"> petani/petani pemantau a.l. Model Jender dalam Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan. kelembagaan keberpihakan petani (petualah pertanian dan kehutanan, staf penyuluhan, pesabang, manajer penyuluhan) perwakilan/pengantar LSM <p>B. LOKASI 16 kabupaten di 9 (sembilan) provinsi: Sumatra, Sulawesi, Jawa, DI, Yogyakarta, DI, Aceh, Kalbar, Sulawesi, NTB.</p> </p>
<p>Telah menerbitkan buku panduan a.l. <ul style="list-style-type: none"> Model Jender dalam Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan. </p>					

Catatan:

- *) Pemberian kredit ke-1 dan ke-2 berfungsi untuk pendirian usaha
- ***) Pemberian kredit ke-3 dan ke-4 berfungsi untuk mengembangkan usaha KPR
- ****) PNM yang telah disuplai (graduasi) diberi sertifikat yang menyatakan kesapan untuk berkegiatan di luar ekonomi pasar dan siap menjadi nasabah Bank terpercaya



374.63

B